

## Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro

Taufik Hidayat<sup>1</sup>, Sarah Wijayanti<sup>2</sup>, Yusuf Amrozi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

<sup>2</sup>Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>[taufieq811@gmail.com](mailto:taufieq811@gmail.com), <sup>2</sup>[sarahwijayanti54@gmail.com](mailto:sarahwijayanti54@gmail.com),

<sup>3</sup>[yusuf.amrozi@uinsby.ac.id](mailto:yusuf.amrozi@uinsby.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the success factors for the implementation of E-Government in Bojonegoro Regency, East Java. Research methods using approach Literature review with a qualitative descriptive method. The research is divided into three stages. The first stage, provides an evaluation of website the Bojonegoro Regency government on the implementation website of the service e-government based on aspects of the assessment of Transparency, Service, Efficiency, Economy, Display Aspiration, and Update. The second stage is to provide an evaluation using the previous research literature approach, namely there are four phases proposed by the World Bank, namely Presence, Interaction, Transaction, and Transformation. The third stage is to analyze stage one and stage two using the SWOT analysis method. The results of the study can be concluded that e-government services so far have not run optimally. The findings of this research can be developed more broadly by using various methods that allow research targets to be "portrait" more accurately, for example data collection techniques can be carried out in the form of Focus Group Discussions or others.*

**Keywords:** *Implementation of E-Government, Bojonegoro, literature review.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi E-Government di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan *Literature review* dengan metode deskriptif secara kualitatif. Penelitian dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, memberikan evaluasi situs *website* pemerintahan Kabupaten Bojonegoro terhadap implementasi *website* pelayanan *e-government* dengan berdasarkan aspek penilaian Transparansi, Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi Tampilan, dan Update. Tahap kedua yaitu memberikan evaluasi menggunakan pendekatan literatur penelitian sebelumnya yaitu ada empat fase yang diusulkan oleh *World Bank* yakni *Presence* (kehadiran), *Interaction* (interaksi), *Transaction* (transaksi), dan *Transformation* (transformasi). Tahap ketiga yaitu melakukan analisa terhadap tahap satu dan tahap dua dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan *e-government* selama ini masih belum berjalan dengan maksimal. Temuan penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan menggunakan berbagai metode yang memungkinkan sasaran penelitian dapat di "potret" secara lebih akurat, misalnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* atau yang lain.

**Kata kunci :** *Implementasi E-Government, Bojonegoro, literature review.*

## Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memunculkan sebuah revolusi baru berupa transisi dari sistem kerja konvensional ke era digital. Kemudahan-kemudahan teknologi, seperti teknologi informasi dan komunikasi, dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tata kelola di Indonesia khususnya di era teknologi dituntut untuk mengikuti perubahan dan juga mengakomodir aspirasi masyarakat di Indonesia dengan cepat. Pada tahun 2003, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan pengembangan yang disebut *E-Government*. salah satu tujuan dari penerapan *e-government* adalah supaya instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pemerintah mengeluarkan beberapa pedoman pada tahun 2003, antara lain Pedoman Pengembangan Infrastruktur Portal Daerah, Pengembangan Pengelolaan Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah,

Pedoman Penyusunan Rencana Kelembagaan e-Government, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TIK dalam mendukung e-government, Pedoman Pelaksanaan dari Website Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2004 meliputi: standar kualitas dan cakupan layanan dan pengembangan aplikasi (*eservices*), kebijakan kelembagaan, otorisasi, informasi dan partisipasi swasta dalam kebijakan tata kelola yang baik dan manajemen perubahan, pedoman pelaksanaan proyek dan e-budgeting. Cetak baru aplikasi e-government pemerintah, pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Komisi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (Detiknas) melalui Keputusan Presiden No. 1. Tanggal 20 Tahun 2006 yang bertanggung jawab untuk percepatan implementasi *e-government*.

World Bank mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi antara lain *wide area networks, the internet, dan mobile computing*. Di setiap instansi

pemerintah ada kemungkinan untuk menjalin komunikasi atau hubungan dengan warga, bisnis dan antar instansi pemerintah yang berbeda. Tujuan dari *e-government* digunakan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan lebih efisien kepada setiap masyarakat, dunia usaha dan industri. Selain itu juga, manfaat yang dihasilkan dari *e-government* akan dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan meningkat dan pengurangan biaya (Arnitasari, 2013). Salah satu strategi efektif *e-government* adalah menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat, menghilangkan jenjang pada birokrasi pemerintah dan memfasilitasi apa yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat, kalangan bisnis, dan pemerintah yang sebelumnya dianggap sulit menjadi mudah. (Sutojo & Aldridge, 2015).

Implementasi *e-government* di Indonesia mengalami kendala di beberapa daerah. Namun, seperti ditunjukkan kota-kota seperti Bandung, Binjai, Yogyakarta, dan Surabaya, *e-government* telah

berhasil di beberapa daerah. Secara umum paradigma birokrasi yang menjadi kunci keberhasilan *e-government* hanya pada teknologi *e-government*. Teknologi bukan satu-satunya faktor yang bisa lebih dominan dari manajemen organisasi, budaya kerja dan etika. Pada beberapa tahun sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang memberikan rumusan terkait faktor keberhasilan suatu *e-government*, diantaranya adalah pada Junita et al (2018) membuat 15 faktor keberhasilan, Wulandari dan Nuryanto (2018) menghasilkan 9 faktor yaitu keamanan, budaya organisasi, pelatihan, visi dan tujuan, perencanaan strategis, dukungan pimpinan, infrastruktur, keuangan dan kolaborasi, Gayatri dan Latrini (2018) menghasilkan 4 faktor dominan keberhasilan, dan yang terakhir Susanto dan Halim (2018) menghasilkan 17 faktor penentu keberhasilan *e-government*.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada di wilayah Jawa Timur yang perbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, dengan kabupaten Tuban,

Kabupaten Lamongan, kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Di bagian Barat Bojonegoro merupakan salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Saat ini Kabupaten Bojonegoro telah menjadi salah satu acuan atau contoh dalam penerapan *e-government* di Indonesia, mengingat aturan mengenai *e-government* telah menginjak usia 19 tahun lamanya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai strategi keberhasilan *e-government* pada Kabupaten Bojonegoro.

### **Literatur Review**

Pada penelitian sebelumnya yaitu pada (Nasution et al., 2020) dengan penelitian yang berjudul “*Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Government di Kota Medan*” menunjukkan bahwa teridentifikasi ada 11 strategi keberhasilan pada layanan *e-government* di Kota Medan.

Pada (Mellyana dkk., 2021) dengan penelitian berjudul “*Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi*

*E-Government di Bandung, Batam, dan Surabaya*” menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi *e-government* ini pada dasarnya akan dapat berjalan baik jika sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat selaku pengguna. Integrasi pelayanan dengan teknologi mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada (Nugraha, 2018) dengan penelitian berjudul “*E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*” menjelaskan bahwa supaya *e-government* berjalan dengan maksimal maka perlu adanya payung hukum yang jelas dan rancangan utama untuk pengembangan *e-government*, termasuk penganggaran. Dikarenakan rendahnya angka literasi staf, maka perlu dilakukan penjadwalan pelatihan TI secara berkesinambungan, dan kedepanya Pemkab Sleman perlu merekrut staf terlatih TI.

Pada (Desriani, 2018) dengan penelitian berjudul “*Strategi Penerapan E-Government di Kota*

*Pekanbaru*” menjelaskan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk setiap OPD yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yaitu kurangnya infrastruktur untuk mengimplementasikan e-government itu sendiri.

Pada (Asri & Widiyanto, 2019) dengan penelitian berjudul “*Faktor Sukses Implementasi E-Government di Kabupaten Tegal*” menjelaskan bahwa dari Keseluruhan 55 faktor tersebut sudah mendorong untuk terwujudnya implementasi *E-Government* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal sebagai *E Government* terkait yang ada pada instansi dengan menggunakan 7 (tujuh) SIM (Sistem Informasi Manajemen) dalam memberikan pelayanan secara tidak langsung

kepada masyarakat yang secara transparan, terkendali, dan akuntabel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan informasi yang relevan, akurat dan relevan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *literature review* dengan metode deskriptif secara kualitatif. Adapun tahapan metode penelitian dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama, memberikan evaluasi situs *website* pemerintahan Kabupaten Bojonegoro terhadap implementasi *website* pelayanan *e-government* dengan berdasarkan aspek penilaian Transparansi, Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi Tampilan, dan Update.

Tahap kedua yaitu memberikan evaluasi dengan pendekatan literatur penelitian sebelumnya yaitu ada empat fase yang diusulkan oleh *World Bank* yakni *Presence* (kehadiran), *Interaction* (interaksi), *Transaction* (transaksi), dan *Transformation* (transformasi).

Tahap ketiga yaitu melakukan analisa terhadap tahap satu dan tahap

dua dengan menggunakan metode analisis SWOT. Setelah melakukan analisis mulai dari tahap satu sampai tiga, diharapkan agar menghasilkan suatu identifikasi strategi keberhasilan layanan *e-government* pada pemerintahan kabupaten Bojonegoro.

### Hasil dan Pembahasan

Untuk mendapatkan identifikasi terhadap strategi keberhasilan layanan *e-government* pada Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, penulis melakukan 3 tahap penelitian.

#### Tahap 1

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengimplementasikan sistem layanan *e-government* kepada masyarakat dengan memberikan 103 layanan *website* antara lain *website* : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Bagian Organisasi & Tata Laksana, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Balen, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bagian Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian, Bagian Kesra, Bagian Perlengkapan, Bagian Humas & Protokol, Bagian Umum dan

Keuangan, Bagian Hukum & Perundang-Undangan, Kecamatan Baureno, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Gondang, Kecamatan Dander, Kecamatan Kanor, Kecamatan Kapas, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Kedewan, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Malo, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Temayang, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Gayam, Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sekar, RSUD Bojonegoro, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan, SETWAN, Perencanaan Daerah, Anggaran Daerah, Evaluasi Kinerja, Rencana Pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa, Absensi Pegawai, Layanan Surat, Laporan!, Online Single Submission, Layanan Umkm Online, Layanan Helpdesk IT, DPRD Bojonegoro, Dashboard Data, Informasi Pendidikan, BPS Bojonegoro, Geoportal Bojonegoro, Informasi Pariwisata, Rilis Pers Bojonegoro, Informasi Harga Pasar, Portal Polres Bojonegoro, Aplikasi Madrim, Forum Radio Bojonegoro, Informasi Tanam dan Panen, Informasi Lalu Lintas ((Bojonegoro *Traffic Information Center*)), SID (Smart Desa), Sippadu (Layanan Perizinan Online), SIBantu (Sistem Informasi Bantuan), Sanduk (Sistem Informasi Santunan Duka), SITabah (Sistem Informasi Tempat Ibadah), KPP (Sistem Informasi Data Perdagangan Pencarian Data KPP), dan *website* Lawan Corona.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi analisa dari 103 *website* pemerintahan kabupaten Bojonegoro dengan nilai Transparansi, Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi, Tampilan, dan Update yang akan diuraikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Evaluasi Nilai Dari 103 Website Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro**

Item Penilaian	Evaluasi
Transparansi	<p>Pada <i>website</i> Anggaran Daerah (BPKAD) tidak terdapat tautan dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada <i>website</i> “DIBantu” terdapat informasi mengenai pengelolaan hibah sejak tahun 2015 baik itu hibah berupa uang maupun barang.</p>
Layanan	<p>Dari 103 <i>website</i>, terdapat 47 layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat yaitu <i>website</i> semua kecamatan (Kecamatan Balen, Kecamatan Baureno, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Gondang, Kecamatan Dander, Kecamatan Kanor, Kecamatan Kapas, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Kedewan, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Malo, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Temayang, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Gayam, Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sekar), Layanan Surat, Laporan!, Online Single Submission, Layanan UMKM Online, Layanan Helpdesk IT, Dashboard Data, Informasi Pendidikan, Informasi Pariwisata, Informasi Harga Pasar, Aplikasi Madrim (Multi Application Digital Integrated System Polres Bojonegoro), Informasi Tanam dan Panen, Informasi Lalu Lintas (Bojonegoro <i>Traffic Information Center</i>), SID (Smart Desa), Sippadu (Layanan Perizinan Online), SIBantu (Sistem Informasi Bantuan), Sanduk (Sistem Informasi Santunan Duka), SITabah (Sistem Informasi Tempat Ibadah), KPP (Sistem Informasi Data Perdagangan Pencarian Data KPP), dan Lawan Corona.</p> <p>Semua <i>website</i> dapat diakses oleh masyarakat, tetapi terdapat beberapa yang belum dilakukan pembaharuan beranda atau berita. Sebanyak 13 <i>website</i> kecamatan telah menunjukkan berita terbaru pada kecamatan tersebut pada tahun 2021 sedangkan 15 <i>website</i> kecamatan sisanya menunjukkan informasi sebelum tahun 2021. Sedangkan <i>website</i> non kecamatan yang dapat diperuntukkan kepada masyarakat yang telah menunjukkan berita terbaru yaitu pada tahun 2021 adalah sebanyak 13 <i>website</i> dan 2 aplikasi. Diantara 28 <i>website</i> kecamatan yang ada, hampir semuanya tidak memiliki menu untuk pelayanan surat seperti pembuatan KK, KTP, surat keterangan pengantar dan lain sebagainya kecuali pada kecamatan Sumberrejo. Tetapi dibutuhkan izin akses</p>



	untuk membuka informasi mengenai pelayanan surat. Setiap aplikasi yang membutuhkan panduan untuk menggunakannya perlu ditambahi dengan menu panduan. Beberapa diantaranya telah memiliki panduan seperti <i>website</i> Laporan!, Online Single Submission, Layanan UMKM Online, dan Sanduk (Sistem Informasi Santunan Duka).
Efisiensi	Masing-masing dari semua <i>website</i> telah memberikan efisiensi dari segi biaya maupun waktu terhadap pekerjaan yang semula dilakukan secara <i>offline</i> atau diluar jaringan.
Ekonomi	Terdapat <i>website</i> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan sosialisasi penanaman modal kepada masyarakat. Selain itu terdapat <i>website</i> pemerintahan lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bagian Perekonomian yang memberikan informasi terbaru terkait dengan kondisi masyarakat di lapangan. Hal tersebut memberikan gambaran sekilas untuk masyarakat luas tentang masyarakat Bojonegoro.
Aspirasi	Terdapat <i>website</i> pelayanan penampung aspirasi maupun keluhan apapun dari masyarakat seperti <i>website</i> Layanan Surat, Laporan!, dan Layanan Helpdesk IT. Tetapi dikarenakan kurangnya panduan yang ada pada <i>website</i> tersebut, membuat penggunaan <i>website</i> tersebut menjadi agak sulit.
Tampilan	Menurut peneliti, tampilan yang ada pada keseluruhan <i>website</i> sudah baik karena menampilkan semua yang dibutuhkan pada masing-masing <i>website</i> tersebut. Namun terdapat beberapa yang masih kurang baik karena minimnya informasi pendukung.
Update	Sebagian besar <i>website</i> telah melakukan pembaruan data pada tahun 2021. Tetapi terdapat beberapa yang masih belum diperbarui datanya dan masih pada tahun-tahun sebelumnya. Alangkah baiknya apabila semua <i>website</i> yang ada telah diperbarui datanya yaitu pada tahun 2021.

Dari hasil analisa evaluasi pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar layanan *e-government* berbasis *website* pada kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki agar *website* yang

ada menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan digunakan secara maksimal.

## Tahap 2

Pada tahapan II ini, penelitian memberikan evaluasi penilaian *e-*

*government* berdasarkan pencapaian tujuannya sesuai dengan (World Bank) yaitu *Presence* (kehadiran), *Interaction* (interaksi), *Transaction* (transaksi), dan *Transformation* (transformasi). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti dapat menyatakan bahwa layanan *e-government* pemerintahan kabupaten bojonegoro sampai saat ini masih pada fase interaksi yaitu suatu fase ke dua dimana pada tahap ini penawaran interaksi yang sederhana antar pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat dan dalam tahapan ini pada situs

layanan web telah tersedia kontak email dan bentuk komunikasi interaktif dalam menghasilkan informasi tanggapan.

### Tahap 3

Pada tahapan ke - III ini, peneliti mencoba membuat suatu analisa SWOT dalam menghasilkan suatu identifikasi strategi dalam keberhasilan *e-government* berdasarkan dari hasil analisa pada tahap 1 dan tahap 2. Penulis membuat suatu identifikasi strategi melalui pendekatan strategi SO, Strategi ST, Strategi WO, dan Strategi WT.

**Tabel 2. Analisa SWOT *e-government* Kabupaten Bojonegoro**

<b>Kekuatan (S)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat sebanyak 103 Layanan <i>website e-government</i> pada Kabupaten Bojonegoro.</li> <li>2) Layanan <i>e-government</i> sudah diterapkan sejak lama dan setiap <i>website</i> memiliki waktu yang bervariasi</li> <li>3) Implementasi layanan <i>e-government</i> telah sesuai dengan visi misi, tujuan, dan strategi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro.</li> <li>4) Sudah banyak diadakannya latihan untuk penggunaan aplikasi pada instansi terkait.</li> <li>5) Sebagian besar telah tersedia sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola layanan <i>website e-government</i>.</li> <li>6) Masyarakat Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan layanan <i>website</i> maupun aplikasi <i>e-government</i> Kabupaten Bojonegoro.</li> <li>7) Pimpinan memberikan dukungan yang kuat untuk memaksimalkan pelayanan <i>e-government</i>.</li> </ol>
<b>Kelemahan (W)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan <i>website e-government</i> Kabupaten Bojonegoro masih banyak yang belum maksimal dalam memberikan kemudahan penggunaan maupun pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>2) Terdapat masyarakat yang masih belum paham dalam menggunakan</li> </ol>

<p>layanan <i>website</i> maupun aplikasi <i>e-government</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Infrastruktur layanan <i>website e-government</i> masih belum maksimal sehingga pelayanan untuk masyarakat juga belum maksimal.</li> <li>4) Sebagian besar budaya organisasi pemerintah telah dibentuk dengan memaksimalkan layanan <i>website e-government</i>.</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintahan pusat mendukung Kabupaten Bojonegoro untuk menjadi <i>smart city</i>.</li> <li>2) Adanya kebutuhan dalam mendapatkan informasi maupun layanan secara cepat dan efisien.</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya ancaman terhadap peretasan, pencurian atau pembobolan data.</li> <li>2) Masyarakat yang gagap teknologi merasa kesulitan dalam menggunakan sistem <i>e-government</i> ini. Sehingga berpendapat bahwa sistem manual lebih mudah untuk dilakukan.</li> </ol>

Peneliti membuat strategi identifikasi melalui strategi SO (kekuatan peluang), strategi ST (kekuatan ancaman), strategi WO (peluang lemah), dan strategi WT (kelemahan ancaman). Rinciannya terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Identifikasi Strategi Keberhasilan *e-government***

<p><b>Strategi SO (Kekuatan Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyesuaikan rencana strategis layanan <i>e-government</i> yang akan diimplementasikan pada periode berikutnya dengan pola pikir antara visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.</li> <li>2) Meningkatkan kualitas layanan <i>e-government</i> melalui pelatihan dan dukungan sumber daya manusia dari instansi pemerintah di Kabupaten Bojonegoro.</li> </ol>
<p><b>Strategi ST (Kekuatan Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diperlukan penguatan sistem keamanan maupun penambahan server pada setiap layanan <i>e-government</i> agar data pengguna maupun pemerintah aman dari para pembobol.</li> <li>2) Sumber daya manusia yang bertugas mengelola perkembangan informasi pada layanan <i>e-government</i> diberikan sosialisasi serta pendampingan secara penuh agar pengelolaan layanan <i>e-government</i> menjadi lebih baik.</li> <li>3) Pengaturan layanan <i>e-government</i> disusun dengan baik untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memahami aturan tersebut.</li> <li>4) Diperlukan adanya sosialisasi terhadap layanan <i>e-government</i>. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat baik itu sosialisasi secara</li> </ol>

langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung contohnya seperti seminar, diskusi, atau melalui buku panduan. Sosialisasi dilakukan terus menerus atau berkelanjutan dengan evaluasi pada setiap kegiatannya.

**Strategi WO (Kelemahan Peluang)**

- 1) Peninjauan atas layanan *e-government* yang bermanfaat dan kurang bermanfaat.
- 2) Meningkatkan kualitas keterserapan anggaran dalam mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana kualitas layanan *e-government* dalam mewujudkan Kabupaten Bojonegoro menjadi *smart city*.
- 3) Membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien dengan berbasis teknologi pada setiap layanan *e-government*.

**Strategi WT (Kelemahan Ancaman)**

- 1) Mendesain ulang beberapa tampilan layanan *e-government* agar lebih mudah dipahami oleh pengguna.
- 2) Pemantauan sistem keamanan *e-government* melalui pemeliharaan dan layanan server untuk mencegah kehilangan data. (*data lossed*).
- 3) Memberikan sistem penghargaan bagi pengguna layanan *e-government*

penulis melakukan penelitian ini hanya dari satu atau dua perspektif dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion). Dan dapat disimpulkan bahwa layanan e-government belum berfungsi secara optimal. Identifikasi yang dijelaskan dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas.

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya *E-government* dikabupaten Bojonegoro selama ini belum berjalan dengan maksimal karena untuk standar dengan (World Bank) masih dalam tahapan interaksi. Namun untuk layanan *e-*

*government* berbasis *website* pada kabupaten Bojonegoro sudah terlaksana cukup baik.

**Daftar Pustaka**

Arnitasari, N. (2013). *Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan Aset. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1)*, 48-55.

Asri, T. A., & Widiyanto, A. (2019). Faktor Sukses Implementasi E-Government Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 14(2)*, 169. <https://doi.org/10.25105/jipak.v>

14i2.5191

Nainggolan, D. P. (2018). *Strategi Penerapan E-Government Di Kota Pekanbaru*. 5(1), 1–13.

Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., Batubara, S. S., Syah, D. H., & Alpi, M. F. (2020). Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Government. *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 11(2), 106–112.

Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.

Rizki Aulia Adinda, dan N. L. I. (2021). *Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di Bandung, Batam, Dan Surabaya*. 4(1), 6.